

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Predikat negara berkembang membuat beberapa masalah timbul di wilayah ini mulai dari masalah fisik seperti bencana alam yang diakibatkan dari letaknya yang strategis diantara dua benua dan samudera juga dilalui oleh sikrum mediterania, dan masalah sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan penduduk. Permasalahan di bidang kependudukan seperti tingkat pertumbuhan penduduk di yang cenderung tinggi yaitu sebesar 1.49% atau sekitar 4.5 juta jiwa bertambah setiap tahunnya (BPS Indonesia, 2020). Angka tersebut lebih tinggi daripada besar laju pertumbuhan penduduk di negara maju yang memiliki persentase 1% setiap tahunnya.

Pemerintah memiliki program Keluarga Berencana (KB) dengan pengertiannya adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak (BKKBN, 2015). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kelahiran, menaikkan taraf hidup bangsa, dan mengurangi tingkat kematian pada ibu hamil dan bayi.

Pelaksanaan program keluarga berencana terealisasi dalam suatu wilayah yang dibentuk secara terstruktur dan sistematis dalam wadah Kampung KB. Kampung KB adalah satuan wilayah tingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat

(BKKBN 2016). Terbentuknya Kampung KB memiliki latar belakang diantaranya (BKKBN, 2016):

1. Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
3. Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat
4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia"
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

KB secara khusus memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi, memfasilitasi, dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Melalui program ini diharapkan pemerintah mampu menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari kuantitas penduduk dengan konsep KB yaitu “Dua Anak Cukup” dan pengaturan pendewasaan pada usia perkawinan dengan konsep “Perkawinan Ideal”, konsep perkawinan ini menggunakan standar umur perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Pada usia ini dikatakan kesehatan dan kesiapan gender untuk menikah telah dirasa mencapai tahap siap. Penekanan kuantitas diharapkan memberi dampak pada kenaikan kualitas pada masyarakat,

kemudahan keluarga dalam menanggung dua jumlah anak akan lebih mudah daripada banyak anak, dengan ini jaminan kesejahteraan kesejahteraan setiap orang tentu akan memiliki kenaikan pada kualitasnya. Peningkatan kualitas masyarakat akan berdampak pada pembangunan dan perencanaan suatu daerah. Dengan hal tersebut pemerintah melakukan pelaksanaan program KB melalui lembaga non kementerian yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Secara resmi lembaga ini menangani sekaligus sebagai pelaksana kegiatan program KB dari tingkat pusat hingga daerah.

Pembangunan suatu wilayah diperlukan perencanaan mulai dari tingkat yang mendasar. Selain itu dalam perencanaan diperlukan tatanan guna mengurangi masalah yang akan timbul pada waktu yang akan datang. Program KB sebagai suatu bentuk perencanaan yang hasilnya mampu mengurangi masalah pemerintahan di bidang kependudukan. Masalah yang timbul dari bidang kependudukan akan merambat mencapai sektor lain seperti perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Hasil dari program KB mampu mengurangi kuantitas penduduk yang kedepannya akan membawa dampak berupa kesejahteraan dan kemajuan pada masyarakat. Kesehatan masyarakat akan ikut terjamin dan pemerintah memiliki kemudahan dalam melakukan pengaturan masyarakatnya sehingga masalah yang terdapat di berbagai sektor akan mudah teratasi. Terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan oleh BKKBN tahun 2015-2019 antara lain :

1. Menurunkan laju rata-rata pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 2,28 persen tahun 2019
2. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019.
3. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019
5. Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019
6. Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Sasaran yang ditetapkan sebagai target dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan ini terbentuknya Kampung KB merupakan realisasi dari lembaga BKKBN dengan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah. Kampung KB sebagai penguat pelaksanaan program KKBPK yang menunjukkan bentuk implementasi dari berjalannya program KB dalam masyarakat.

Awal terbentuknya Kampung KB pada tahun Januari 2016 yang dicanangkan oleh presiden Ir. Joko Widodo. Kampung KB yang pertama kali diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu di Desa Martasinga Kecamatan 11 Gunung Jati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan wilayah ini berdasarkan jumlah penduduk yang terbanyak di wilayah Jawa Barat. Selain menjalankan program KB wilayah yang ditunjuk diharap mampu dalam perencanaan berkeluarga dan implementasi kependudukan yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya perubahan yang positif dari adanya Kampung KB. Perencanaan diperlukan untuk semua orang demi kehidupan yang berkelanjutan dan guna mencapai kesejahteraan serta hidup yang berkualitas.

Tabel 1. 1 Kampung KB di Kota Surakarta

No	Tahun Lauching	Nama Kampung KB	Kelurahan	Kecamatan	Klasifikasi
1	2016	Pucangsawit	Pucangsawit	Jebres	Berkelanjutan
2	2017	Sehati	Banjarsari	Banjarsari	Berkelanjutan
3		Mojo Mapan	Mojo	Pasar Kliwon	Berkembang
4		Kencana Jaya	Joyotakan	Serengan	Berkelanjutan
5		Sejahtera	Pajang	Laweyan	Berkelanjutan
6		Bimasakti	Jebres	Jebres	Berkelanjutan
7	2018	Cerah Ceria	Kestalan	Banjarsari	Berkembang
8		Makmur	Sangkrah	Pasar Kliwon	Berkelanjutan
9		Cemara	Serengan	Serengan	Berkembang
10		Gendhis	Panularan	Laweyan	Berkelanjutan
11		2019	Berkah Mina	Nusukan	Banjarsari
12	Sosera		Sondakan	Laweyan	Berkelanjutan
13	2020	Sewu Bersatu	Sewu	Jebres	Dasar
14		Srikandi	Gilingan	Banjarsari	Dasar
15		Mrantasi	Semanggi	Pasar Kliwon	Dasar
16		Kusuma Mulia	Danukusuman	Serengan	Berkembang
17		Semar	Purwosari	Laweyan	Berkembang
18	2021	Mojo Sekti	Mojosongo	Jebres	Berkembang
19		Kerta Raharja	Kadipiro	Banjarsari	Berkembang
20		Siaga Tandyo	Joyosuran	Pasar Kliwon	Dasar
21		Semarak	Tipes	Serengan	Dasar
22		Bahagia	Sriwedari	Laweyan	Berkembang

Sumber: DPPKB Kota Surakarta, tahun 2021

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kelurahan Pucangsawit termasuk di dalam perencanaan Kampung KB yang dicanangkan oleh KA. BKKBN RI. Kampung KB dicanangkan pada 11 November 2016, dan Kelurahan

Sondakan termasuk dalam daftar Kampung KB mulai dari tahun 2019 (BKKBN Kota Surakarta, 2021) program Kampung KB masih berjalan di wilayah tersebut. Terdapat kriteria yang ditentukan oleh BKKBN sebagai penunjukkan Kampung KB diantaranya:

Kriteria utama:

1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

Kriteria wilayah:

1. Kumuh
2. Pesisir
3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Bantaran Kereta Api
5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
6. Terpencil
7. Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata
10. Padat Penduduk

Kriteria Khusus:

1. Kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga.
2. Kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan.

4. Kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah.
5. kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, permukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Kelurahan Pucangsawit termasuk di dalam daftar Kampung KB di Jawa Tengah. Terpilihnya daerah ini dapat dilihat dari kriteria utama dan kriteria wilayah yang termasuk pada kawasan DAS, padat penduduk, dan terdapat industri di dekatnya. . Sedangkan Kampung KB di Kelurahan Sondakan memiliki kriteria utama dan kriteria wilayah bantaran rel, kawasan DAS, dan Kawasan adat penduduk. Kriteria wilayah dapat dijelaskan melalui survei dan pengamatan melalui citra satelit.

Tabel 1. 2 Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah (Ribu)	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Relative (%)
1.	2019	517,05	0,23
2.	2020	522,36	1,03
3.	2021	522,73	0,07

Sumber: BPS Surakarta 2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami perubahan. Kenaikan terbesar pada tahun 2019-2020 yaitu sebesar 1,03%, sedangkan pada tahun 2021 kenaikan penduduk sebesar 0,07%. Angka pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49% per tahunnya (BPS Indonesia, 2020) maka jika dilihat berdasarkan data tersebut pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta memiliki angka yang tidak konstan.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2020-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2020-2021	
		Ribu	Pertumbuhan %
1.	Laweyan	88.578	0,06
2.	Serengan	47.853	0,16
3.	Pasar Kliwon	78.565	0,06
4.	Jebres	138.859	0,06
5.	Banjarsari	168.873	0,06
Jumlah		522.728	0,07

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk di Kota Surakarta yang memiliki jumlah berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penambahan penduduk sebesar 36.690 jiwa atau sebesar 0,07% kenaikan ini lebih rendah daripada kenaikan penduduk nasional sebesar 1,49%. Sedangkan jumlah penduduk belum mengalami penurunan. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk sebanyak 0,06 di setiap kecamatan.

Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Sondakan sebagai lokasi penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Lokasi Penelitian

No.	Lokasi	Keterangan	Tanggal	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	RW XII Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Dicanangkan oleh KA.BKKBN	11 November 2016	BKB BKR BKL UPPKS PIK-R	1 Kali sebulan pada minggu pertama
2.	RW XI Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	Dicanangkan oleh walikota	6 September 2019	BKB BKR BKL UPPKS PIK-R	1 Kali sebulan

Sumber: BKKBN, tahun 2020

Lokasi penelitian Kampung KB terletak pada RW 12 Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang dicanangkan oleh KA.KKBN pada tanggal 11 November 2016. Lokasi penelitian ke dua terletak di RW XII Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang dicanangkan oleh walikota pada 6 September 2019. Terdapat kegiatan diantaranya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 kali dalam 1 bulan.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan di Kecamatan Jebres 2016-2020

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepatihan Kulon	2.432	2.381	2.394	2.447	2.425
Kepatihan Wetan	2.618	2.551	2.600	2.608	2.601
Sudiroprajan	3.860	3.725	3.771	3.795	3.811
Gandekan	9.286	9.067	9.171	9.185	9.121
Sewu	7.264	7.121	7.158	7.209	7.204
Pucangsawit	13.822	13.778	13.923	13.967	14.169
Jagalan	12.194	11.970	12.096	12.126	12.165
Purwodiningratan	5.062	4.891	4.877	4.939	4.911
Tegalharjo	5.016	4.886	4.858	4.947	4.954
Jebres	33.076	32.580	33.054	33.455	33.560
Mojosongo	51.588	51.291	52.149	53.016	53.855
Total	146.209	144.241	146.051	147.694	150.796

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Tabel 1.5 menunjukkan Program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dibentuk berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut, jika dilihat dari trend pertumbuhan penduduk jumlah penduduk di Kelurahan Pucangsawit cenderung bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk di Kelurahan Pucangsawit memiliki urutan ke-3 setelah Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres. Namun pemilihan lokasi Kampung KB pertama di Kelurahan Pucangsawit karena terdapat kriteria lainnya yang mendukung terbentuknya Kampung KB, Seperti kriteria wilayah dan kriteria khusus.

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan di Kecamatan Laweyan 2016-2020

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajang	24.746	24.497	24.918	25.103	25.276
Laweyan	2.130	2.107	2.114	2.130	2.124
Bumi	6.354	6.274	6.303	6.302	6.320
Panularan	9.429	9.319	9.448	9.494	9.489
Sriwedari	4.124	3.971	4.026	4.084	3.951
Penumping	4.095	3.886	3.947	3.934	4.052
Purwosari	10.377	10.206	10.199	10.234	10.172
Sondakan	12.250	12.129	12.209	12.259	12.293
Kerten	9.448	9.272	9.263	9.330	9.352
Jajar	9.362	9.271	9.370	9.387	9.382
Karangasem	10.018	9.929	10.076	10.267	10.351
Total	102.333	100.861	101.873	102.524	102.762

Sumber: BPS Surakarta, 2020

Tabel 1.6 menunjukkan Program Kampung KB di Kelurahan Sondakan dibentuk berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut, jika dilihat dari trend pertumbuhan penduduk jumlah penduduk di Kelurahan Sondakan cenderung bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk di Kelurahan Sondakan memiliki urutan ke-2 setelah Kelurahan Pajang. Namun pemilihan lokasi Kampung KB berdasarkan kriteria khusus dan kriteria wilayah.

Tabel 1. 7 Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan di Kecamatan Jebres Tahun 2020

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)
Kepatihan Kulon	2.425	0,175	12.790
Kepatihan Wetan	2.601	0,225	11.392
Sudiroprajan	3.811	0,230	16.085
Gandekan	9.121	0,350	26.501
Sewu	7.204	0,485	15.348
Pucangsawit	14.169	1,270	11.138
Jagalan	12.165	0,650	19.634
Purwodiningratan	4.911	0,373	12.736
Tegalharjo	4.954	0,325	12.418
Jebres	33.560	3,170	7.755
Mojosongo	53.855	5,328	9.120
Total	148. 776	12,58	10.348

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Tabel 1.7 menunjukkan kepadatan penduduk di setiap kelurahan. Kelurahan Gandekan sebagai kelurahan terpadat di Kecamatan Jebres yaitu dengan kepadatan 26.501 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebesar 9.121 dan luas 0,35 km². Sedangkan Kelurahan yang memiliki kepadatan terkecil adalah Kelurahan Jebres yaitu sebesar 7.755 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebesar 33.560 dan luas 3,170 km². Kelurahan Mojosongo sebagai kelurahan terluas dan penduduk yang paling banyak namun dengan kepadatan yang paling rendah. Sedangkan pada wilayah penelitian yaitu Kelurahan Pucangsawit dengan kepadatan 11.138 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebesar 14.169 dan luas 1,27 km². Angka kepadatan di Kelurahan

Pucangsawit lebih rendah daripada angka kepadatan penduduk Kota Surakarta.

Tabel 1. 8 Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan di Kecamatan Laweyan Tahun 2020

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)
Pajang	25.276	1,553	16.514
Laweyan	2.124	0,248	10.329
Bumi	6.320	0,373	17.699
Panularan	9.489	0,544	16.903
Sriwedari	3.951	0,513	7.379
Penumping	4.052	0,503	8.017
Purwosari	10.172	0,843	12.531
Sondakan	12.293	0,785	15.348
Kerten	9.352	0,921	7.577
Jajar	9.382	1,055	8.153
Karangasem	10.351	1,300	7.221
Total	102.762	8,638	11.259

Sumber: BPS Surakarta, 2021

Kelurahan Bumi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar 17.699 jiwa/km² dengan luas wilayah 0,544 km², kemudian Kelurahan Panularan memiliki tingkat kepadatan 16.903 jiwa/km² dengan luas wilayah 0,373 km². Sedangkan Kelurahan Sondakan memiliki kepadatan penduduk sebesar 15.348 jiwa/km² dengan luas wilayah 0,785 km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil terdapat pada

Kelurahan Karangasem yaitu 10.351 jiwa/km² dengan luas wilayah 1,300 km².

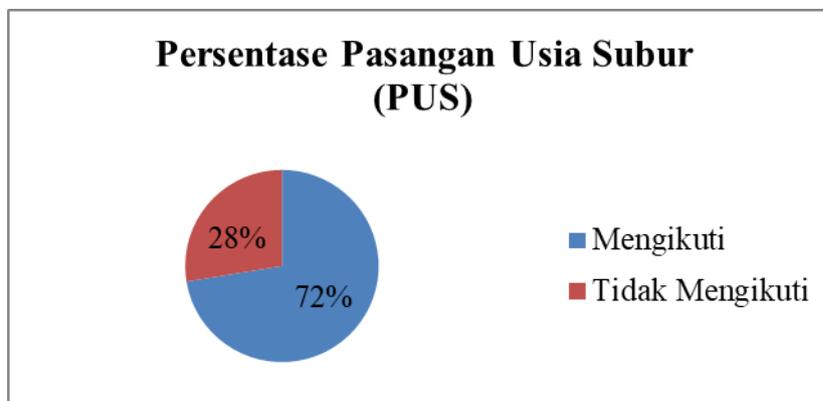
Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu berkisar antara 15 – 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. (BKKBN, 2011).

Tabel 1. 9 Pasangan Usia Subur dan Status Kesertaan dalam Program KB di Kelurahan Pucangsawit.

No	Status Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
1.	Mengikuti	1.270
2.	Tidak Mengikuti	484
Total		1.754

Sumber: BKKBN, tahun 2016

Tabel 1.9 menjelaskan bahwa jumlah PUS yang mengikuti program KB yaitu 1.270 jiwa jumlah tersebut lebih banyak daripada PUS yang tidak mengikuti KB yaitu 484 jiwa. Persentase yang mengikuti KB sebesar 72% dan yang tidak mengikuti sebesar 28%. Lebih dari 50% program ini diikuti masyarakat di Kelurahan Pucangsawit.



Gambar 1. 1 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dan Status Kesertaan dalam Program KB di Kelurahan Pucangsawit

Sumber: Penulis, 2020

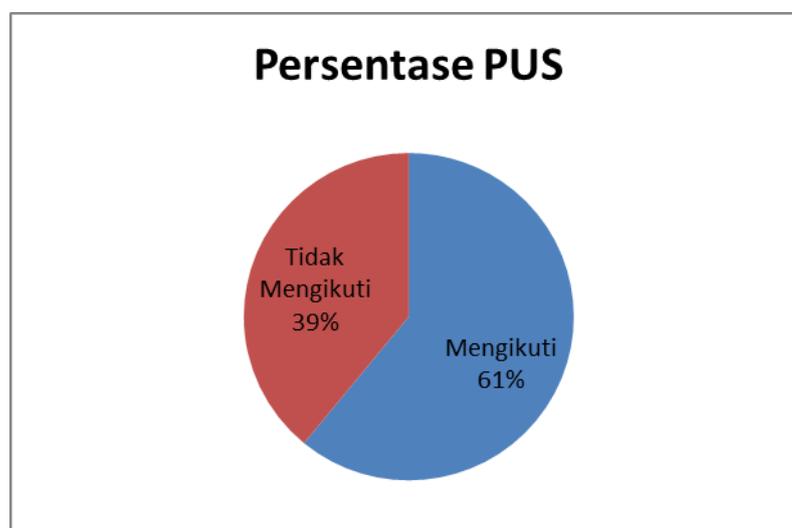
Gambar 1.1 menjelaskan bahwa persentase yang mengikuti KB sebesar 72% dan yang tidak mengikuti sebesar 28%. Lebih dari 50% program ini diikuti masyarakat di Kelurahan Pucangsawit. Diharapkan bahwa akan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan program KB. Kesadaran diperlukan untuk mendapatkan manfaat positif dari pengaturan program KB.

Tabel 1. 10 Pasangan Usia Subur dan Status Kesertaan dalam Program KB di Kelurahan Sondakan

No	Status Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
1.	Mengikuti	153
2.	Tidak Mengikuti	98
Total		251

Sumber: BKKBN, Tahun 2019

Tabel 1.10 menjelaskan bahwa jumlah PUS yang mengikuti program KB yaitu 251 jiwa jumlah tersebut lebih banyak daripada PUS yang tidak mengikuti KB yaitu 98 jiwa. Persentase yang mengikuti KB sebesar 61% dan yang tidak mengikuti sebesar 39%. Lebih dari 50% program ini diikuti masyarakat di Kelurahan Sondakan.



Gambar 1. 2 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dan Status Kesertaan dalam Program KB di Kelurahan Pucangsawit

Sumber: Penulis, 2020

Tabel 1. 11 Penggunaan Alat Kontrasepsi KB Per Kelurahan di Kecamatan Jebres Tahun 2020

Kelurahan	Alat Kontrasepsi							
	MOW	MOP	IUD	Implant	Suntik	Pil	Kondom	PUS
Kepatihan Kulon	10	1	65	19	47	13	16	220
Kepatihan Wetan	5	2	35	39	63	5	13	197
Sudioprajan	7	1	21	8	98	14	35	282
Gandekan	29	1	107	50	337	63	73	993
Sewu	2	0	121	33	210	45	65	791
Pucangsawit	39	1	161	151	666	129	84	1.754
Jagalan	29	14	158	47	402	31	95	1.096
Purwodiningratan	11	2	43	49	122	13	34	399
Tegalharjo	23	4	32	12	90	15	50	335
Jebres	108	4	314	240	1.131	187	404	3.932
Mojosongo	114	13	448	345	2.051	394	1.040	6.805
Jumlah	377	39	1.802	993	5.217	909	1.909	16.804

Sumber: BPS Kecamatan Jebres dalam Angka, 2021

Tabel 1.11 Menjelaskan bahwa data yang diambil berdasarkan awal terbentuknya Kampung KB terdapat 7 jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat diantaranya MOW, MOP, IUD, implant, suntik, pil, dan kondom. Jumlah peserta KB paling banyak terdapat pada Kelurahan Mojosongo yaitu 6.805 jiwa sedangkan jumlah peserta yang paling sedikit terdapat pada Kelurahan Kepatihan Wetan yaitu sebesar 197 jiwa. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Jebres adalah suntik yaitu sebanyak 5.217 pengguna, sedangkan alat kontrasepsi MOP memiliki pengguna yang paling sedikit yaitu sebanyak 39 pengguna. Di Kelurahan Sewu tidak dijumpai pengguna MOP. Sedangkan untuk pengguna kontrasepsi MOW dan kondom memiliki angka dengan kisaran yaitu 377 dan 1.909 pengguna. Alat kontrasepsi suntik memiliki angka yang paling tinggi pengguna di seluruh kelurahan. MOP sebagai alat kontrasepsi dengan pengguna paling sedikit di seluruh kelurahan.

Tabel 1. 12 Penggunaan Alat Kontrasepsi KB Per Kelurahan di Kecamatan Laweyan Tahun 2020

Kelurahan	Alat Kontrasepsi							Jumlah
	MOW	MOP	IUD	Implant	Suntik	Pil	Kondom	
Pajang	89	5	374	64	794	216	209	2.774
Laweyan	9	1	25	1	46	9	41	189
Bumi	19	2	109	7	104	49	48	541
Panularan	38	5	176	24	214	91	58	1.002
Sriwedari	8	1	50	8	54	7	16	205
Penumping	15	1	50	4	57	9	32	282
Purwosari	27	2	143	39	188	74	97	878
Sondakan	49	3	173	27	360	129	183	1.298
Kerten	67	4	194	16	210	62	102	1.030
Jajar	25	0	99	27	255	45	87	828
Karangasem	67	1	134	36	271	62	117	1.022
Jumlah	413	25	1.527	253	2.553	753	990	10.049

Sumber: BPS Kecamatan Laweyan dalam Angka, 2021

Tabel 1.12 Menjelaskan bahwa data yang diambil berdasarkan awal terbentuknya Kampung KB menunjukkan bahwa jumlah peserta KB paling banyak terdapat pada Kelurahan Pajang yaitu 2.774 jiwa sedangkan jumlah peserta yang paling sedikit terdapat pada Kelurahan Laweyan yaitu sebesar 189 jiwa. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Laweyan adalah suntik yaitu sebanyak 2.553 pengguna, sedangkan alat kontrasepsi paling sedikit adalah MOP sebesar 25 jiwa.

Keluarga Pra KS tidak memenuhi 6 indikator dari kebutuhan dasar keluarga sedangkan KS 1 Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga. Jika dilihat dari angka KS di Kelurahan Pucangsawit masih tergolong banyak sehingga dari data tersebut sebagai kriteria terbentuknya Kampung KB. Di Kampung KB Kelurahan

Pucangsawit terdapat keluarga Pra KS 373 dan KS 1 509 ditahun 2016 dan di Kampung KB Kelurahan Sondakan Terdapat keluarga Pra KS 14 dan KS 1 326 ditahun 2019 (BKKBN Surakarta, 2020). Perbandingan Rata-rata Keluarga Pra sejahtera dan KS 1 di Kampung KB Pucangsawit dan Sondakan yaitu 283, 596 banding 102, 1.359 (BPS Surakarta, 2020). Sedangkan bukti Kampung KB dari wilayah dapat dilihat pada lampiran peta.

Tabel 1. 13 Perbandingan Wilayah Kampung KB Pada Awal Pembentukan

No.	Data Perbandingan	Kelurahan Pucangsawit	Kelurahan Sondakan
1.	Jumlah penduduk	13.822 jiwa	12.259 jiwa
2.	Luas wilayah	12,58 km ²	8,638 km ²
3.	Jumlah akseptor	851 jiwa	768 jiwa
4.	Jumlah PUS	1754 jiwa	251 jiwa
5.	Jumlah keluarga Pra KS dan KS 1	373 dan 509	14 dan 326

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2017

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka Program Kampung KB yang telah dicanangkan pada 11 November 2016 tepatnya di RW XII Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta dipilih sebagai daerah penelitian karena wilayah tersebut memiliki kriteria wilayah yang termasuk dalam Program Kampung KB yaitu area padat penduduk, juga sebagai wilayah perbatasan dan Daerah Aliran Sungai. Pengkajian Program Kampung KB wilayah ini diperlukan untuk melihat hasil dari program yang telah dicanangkan sejak 11 November 2016 yang kemudian dapat dipresentasikan untuk informasi masyarakat.

Sebagai wilayah pembanding untuk menganalisis program maka dipilihlah wilayah Kampung KB Kelurahan Sondakan RW XI Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan program yang telah dicanangkan pada 6 September 2019, dengan kriteria utama dan kriteria wilayah padat penduduk, bantaran sungai dan bantaran rel. Sehingga dari rincian data dan tujuan yang telah dituliskan maka disusunlah penelitian dengan judul “ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KELURAHAN PUCANGSAWIT KECAMATAN JEBRES DAN KELURAHAN SONDAKAN KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Sondakan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Sondakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Sondakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Sebagai masukan pihak terkait pelaksana Program Kampung KB.
3. Menambah wawasan penulis sekaligus pembaca mengenai Program Kampung KB.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) menurut UU no 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Bab 1 Pasal Ayat 10). Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN). Dasar Pembentukan Kampung KB diantaranya:

1. Surat Edaran menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan pembentukan Kampung KB
2. Surat dari BKKBN Propinsi Jawa Tengah No. 8890/RC.300/J.I/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal pembentukan kampung KB
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten temanggung No. 476/008/3 tanggal 8 Maret 2017 tentang Program KKBPK dan Pembentukan Kampung KB

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksanaannya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya

Indikator Keberhasilan

Dalam pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:40) dinyatakan bahwa indikator keberhasilan program Kampung KB adalah sebagai berikut :

a. Indikator Input

- Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB.

- Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat.
- Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana.

b. Indikator Proses

- Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi.
- Peran serta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
- Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.
- Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan dicsetiap keluarga.
- Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.
- Frekuensi pelayanan KB-KR.
- Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
- Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga maupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).
- Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB.

c. Indikator Output

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu :

- Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah).
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).
- Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Meningkatnya income per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga.

- Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman.
- Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung.
- Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan.

Kampung KB juga memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dapat dibagi menjadi dua yaitu eksternal dan internal, faktor eksternal berasal dari luar yaitu anggaran Kampung KB yang terbatas untuk melaksanakan programnya dan faktor internalnya sendiri adalah masyarakat yang kurang berpartisipasi dan enggan mengikuti program tersebut (Nunung Nurwanti, 2020). Program Kampung KB juga memiliki Faktor pendukung yaitu meningkatnya SDM, peningkatan infrastruktur daerah Kampung KB yang dipilih, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan sumberdaya yang berpotensi(Nunung Nurwanti, 2020).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 1. 14 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

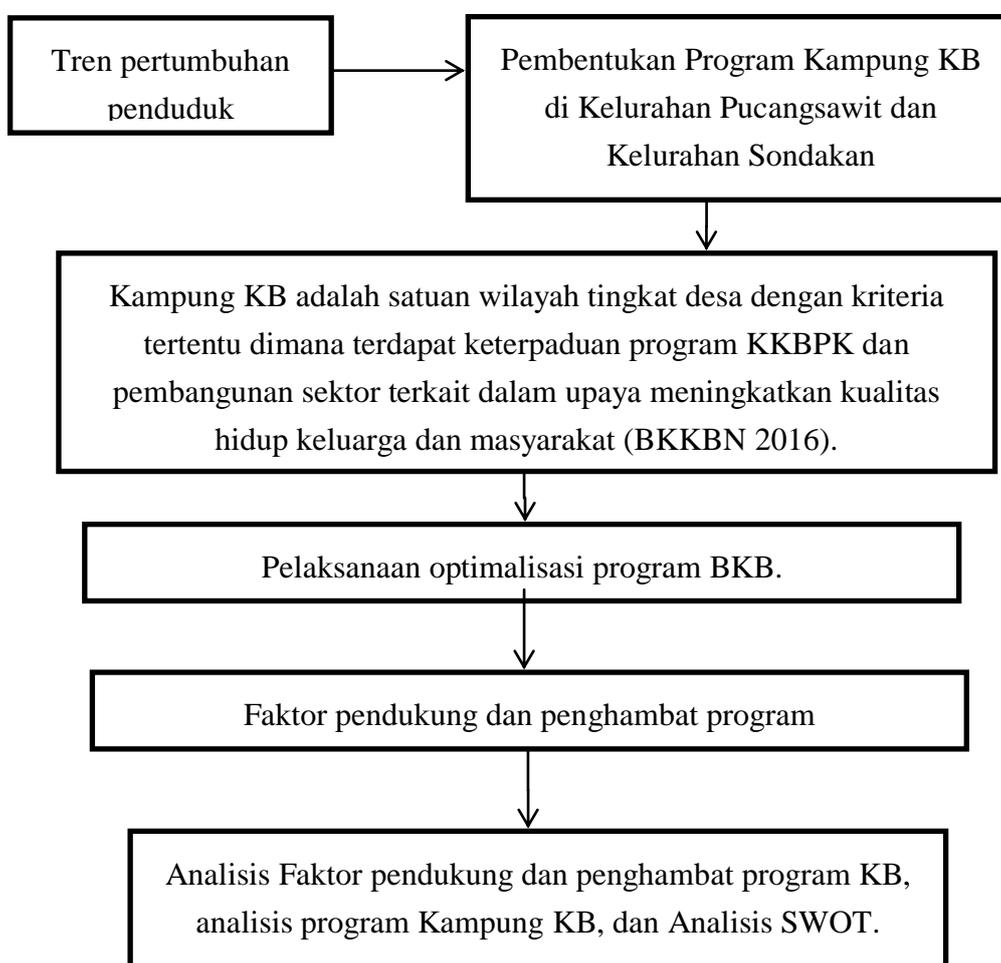
Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Fitri Yulianti, 2004	Analisis Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta	- Untuk mengetahui pelaksanaan Keluarga Berencana di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Survei	- Tingkat optimalisasi KB di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta - Pengaruh faktor pendidikan dan ekonomi pada KB.
Devi Patikasari, 2018	Analisis Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Japoh Kecamatan Jenar dan Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2018	- Menganalisis awal pelaksanaan program Kampung KB di Desa Japoh Kecamatan Jenar dan Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2018 - Menganalisis faktor fisik dan non fisik yang mempengaruhi program kampung KB di Desa	Survei	- Analisis SWOT pada Program Kampung KB - Faktor fisik dan non fisik yang mempengaruhi Program Kampung KB

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
		Japoh Japoh Kecamatan Jenar dan Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2018		
Ferawati, 2017	Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan	- Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Program Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Hilir	Survei	- Data kualitatif mengenai Program Kampung KB
Dhiani Nur Fa'izah, 2020	Analisis Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres dan Kelurahan Sondakan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	- Menganalisis Program Kampung KB di Kelurahan Pucangsawit dan Sondakan - Menganalisis Faktor pendukung dan penghambat program Kampung KB Di Kel. Pucangsawit dan Sondakan	Survei	- Analisis program Kampung KB - Analisis SWOT program Kampung KB - Analisis faktor pendukung dan penghambat program Kampung KB

Sumber: Penulis, 2021

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pola pikir peneliti terhadap objek kajian yang dituangkan dalam sebuah diagram alir (flow chart) yang menggambarkan hubungan fungsional antar variabel dan konsep (Hadi Sabari, 2010). Tren pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya sebesar 2% pada skala nasional. Kampung KB diyakini sebagai solusi dari pertumbuhan penduduk guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2021

1.7 Batasan Operasional

- Penduduk adalah anggota masyarakat, warga negara sebagai himpunan, kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu (UU.RI.NO.10 Tahun 1992)
- Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Arif Rohman (2009: 101-102) Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK (Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga) yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. (Surya Candra : 2015)
- Keluarga Berencana (KB) menurut UU no 52 Tahun 2009 : tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Bab I Pasal Ayat 10).
- Kampung KB adalah satuan wilayah tingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (BKKBN 2016).
- Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW) (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005).